



DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

PRESS CABLE

NOMOR : 241/31122008
HARI : RABU
TANGGAL : 31 DESEMBER 2008

DAFTAR ISI

		Halaman
I.	INTERNASIONAL	
	RI Sampaikan Surat Keprihatinan ke PBB	3
	RI Kirim Bantuan ke Palestina	5
	China Tempatkan RI di Papan Atas Hubungan Politik	6
	Indonesia Usulkan Reformasi Sistem Keuangan Global	6
	EKONOMI KAWASAN: Indonesia Berpeluang dalam Krisis	8
	LAPORAN EKONOMI INTERNASIONAL: Era Kegelapan Menghantui Dunia	9
II.	NASIONAL	
	A. POLITIK	
	MUI urges Muslims to boycott U.S. products	10
	B. EKONOMI	
	Pemerintah Jajaki Ekspor Beras 2009	11
	5 Pelabuhan Telah Disetujui	11
	Negosiasi Tangguh Dilanjutkan	12
	Tahun Indonesia Kreatif 2009: Krisis Jadi Peluang bagi Ekonomi Kreatif	12
	C. SOSBUD	
	RAKORNAS BNP2TKI 2011, TKI Akan Kuasai Pasar Tenaga Kerja di Timteng	13

	D.	HANKAM	
		South Korea buys Indonesian aircraft for coastguard	14
	E.	HUKUM	
		Pemberantasan Korupsi: KPK Selamatkan Rp 190 Miliar Selama 2008	15
	F.	OLAHRAGA	--
	G.	LINGKUNGAN HIDUP	--
	III.	ARTIKEL	
		Telaah -- Krisis Ekonomi Global Pasca-Sedasawarsa Krisis Ekonomi Asia (Oleh Bob Widyahartono, MA.)	15
	IV.	LAIN-LAIN	--
	V.	EDITORIAL	
		Masih Dunia yang Belum Aman	17
		Count our blessings	18

Jakarta, 31 Desember 2008
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media

I. INTERNASIONAL :

1. RI Sampaikan Surat Keprihatinan ke PBB

Indonesia telah menyampaikan keprihatinannya atas situasi di Jalur Gaza kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon dan Presiden Dewan Keamanan (DK) PBB Neven Jurica.

Surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut telah disampaikan Wakil Tetap Republik Indonesia (RI) kepada PBB di New York, Dr RM Marty M Natalegawa, Senin (29/12) atau Selasa waktu Indonesia.

Dalam pertemuan dengan Sekjen PBB itu, Marty menyatakan keprihatinan Indonesia atas situasi di Jalur Gaza dan mengutuk kekerasan Israel atas warga sipil di Jalur Gaza. "Kami menegaskan keprihatinan Indonesia atas krisis kemanusiaan di Jalur Gaza, serta pentingnya bantuan kemanusiaan dan ekonomi yang berkelanjutan. Kami garis bawah pula, jika Israel tetap tidak mengindahkan seruan DK PBB, perlu dilakukan langkah lebih lanjut guna memastikan kepatuhan Israel," kata Marty dalam pernyataan yang diterima SH, Selasa siang ini.

Indonesia juga terus melanjutkan koordinasi dengan Libia selaku anggota tidak tetap DK PBB yang mewakili Kelompok Arab, dalam rangka menindaklanjuti perhatian DK PBB terhadap situasi di Jalur Gaza.

Korban Tewas Bertambah

Kantor berita AP melaporkan, militan Palestina melancarkan serangan rudal ke Israel, Senin. Empat warga Israel termasuk seorang tentara tewas, dan delapan lainnya cedera. PBB melaporkan akibat serangan Israel ke Gaza, jumlah warga Palestina yang menjadi korban di hari ketiga mencapai 364 orang. Dari jumlah tersebut, sedikitnya 62 orang merupakan warga sipil.

Selasa pagi, pesawat Israel menjatuhkan sedikitnya 16 bom di lima gedung pemerintah di Kota Gaza. Kelima gedung tersebut hancur, terbakar, dan puing-puingnya bertebaran hingga ratusan meter, kata saksi. Petugas penyelamat menyatakan, sedikitnya 40 orang cedera dalam peristiwa tersebut.

Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Livni mendesak warga Palestina yang tinggal di bangunan di mana Hamas beroperasi agar pindah ke bagian lain di wilayah Gaza guna menghindari sasaran militer Israel. Kepada jaringan televisi Al-Jazeera, Senin, Tzipi menyatakan Hamas menyandera rakyat Gaza dan menggunakan wilayah itu untuk menembak wilayah Israel. Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyerukan persatuan dengan Hamas agar agresi besar-besaran Israel terhadap Gaza berakhir.

Sekjen PBB Ban Ki-moon meminta gencatan senjata segera. Ban Ki-moon mengatakan sangat prihatin dengan tindak kekerasan di Gaza. Meski mencela penggunaan kekuatan militer yang berlebihan dari Israel, Ban mengakui negara itu berhak membela diri dari serangan roket militan Palestina.

Menurut BBC, Israel mengerahkan pasukan di perbatasan Gaza dan menyatakan daerah di sekelilingnya sebagai zona militer tertutup. Palang Merah mengatakan situasi di berbagai rumah sakit Gaza dalam keadaan kacau dan tim medis bekerja mati-matian. Sementara itu, sejumlah kecil orang Palestina yang luka-luka sudah menyeberangi perbatasan Rafah masuk ke Mesir untuk perawatan, dan truk-truk yang bermuatan obat-obatan diizinkan masuk ke Gaza. Para menteri luar negeri Uni Eropa akan mengadakan pertemuan guna membahas krisis tersebut di Paris, Selasa.

Puluhan pusat kekuatan Hamas, termasuk kompleks keamanan, kantor-kantor pemerintah, dan terowongan ke Mesir, hancur sejak Israel melancarkan pengeboman besar-besaran, Sabtu pekan lalu.

Kecaman Terus Mengalir

Sementara itu, oposisi di Parlemen Belanda menyatakan kekecewaan terhadap reaksi negerinya atas situasi di Jalur Gaza. Menurut Radio Netherland, Menteri Luar Negeri (Menlu) Belanda Maxime Verhagen mendapat kecaman karena tanggapannya terhadap serangan Israel di Jalur Gaza. Beberapa jam setelah Israel menyerang sasaran Hamas, Verhagen mencela provokasi oleh Hamas “sebagai pemicu keadaan ini” dan berseru kepada Israel “agar berusaha lebih menahan diri guna mencegah jatuhnya korban tewas lebih banyak”.

Pemimpin kubu oposisi dari Partai Sosialis Agnes Kant menyatakan, Menlu Verhagen memberikan reaksi yang tidak layak dan sepihak. Kant mendesak agar sang Menlu tidak hanya mencela provokasi-provokasi Hamas, tetapi juga serangan udara yang dilancarkan Israel. “Itu reaksi yang tidak proporsional terhadap aksi kekerasan Israel yang berlebihan. Satu-satunya tanggapan yang cocok adalah mencela Israel dan mendesak negeri itu menghentikan kekerasan,” kata Kant seperti dikutip situs Radio Netherland. Selain Sosialis, Partai D66 yang moderat dan seorang anggota parlemen partai buruh PvdA—mitra koalisi pemerintah—menghendaki agar Verhagen secara terang-terangan mencela serangan Israel.

Walau dikecam, reaksi Maxime hampir serupa dengan negara-negara Eropa lainnya. Kanselir Jerman Angela Merkel dalam pembicaraan lewat telpon dengan PM Israel Ehud Olmert sepakat bahwa Hamas bertanggung jawab atas perkembangan keadaan di wilayah itu. Menlu Prancis Bernard Kouchner mengatakan, “Ini episode tragis yang berlangsung saat ada kekosongan kekuasaan di Israel dan AS.... Prancis dan Eropa harus berupaya agar penembakan dengan rudal secepatnya dihentikan, mengakhiri pengeboman balas dendam dan membuka pintu Gaza.... Eropa bisa berperan di sini”.

Tidak Hanya Hamas

Sementara itu, situs berita Israel, Haaretz menurunkan berita “Serangan Gaza tidak hanya terhadap Hamas, tetapi seluruh warga Palestina”. Situs tersebut melaporkan, sekitar pukul 15.19, Minggu, suara misil yang mendekat terdengar saat salah seorang wartawannya menelepon. Kemudian, terdengar pula tangis anak-anak yang ketakutan. Di wilayah Kota Gaza, di lingkungan Tel Al-Hava, gedung-gedung apartemen sangat padat, puluhan anak-anak tinggal di tiap gedung dan ratusan di tiap bloknya.

Minggu siang, angkatan udara Israel mengebom Kompleks Badan Keamanan Nasional Gaza. Di tempat itu terdapat penjara utama Kota Gaza. Tiga tahanan tewas. Dua di antaranya anggota Fatah. Korban ketiga divonis karena berkolaborasi dengan Israel. Hamas telah mengevakuasi sebagian besar tahanan ke penjara lain.

Pada Minggu tengah hari, sang wartawan menerima telepon lain. Tiga anggota tetangganya tewas. Semuanya berusia 20-an tahun. Tidak ada satu pun yang memiliki senjata atau amunisi. Mereka hanya kebetulan lewat saat Angkatan Udara Israel mengebom mobilnya. Korban lain adalah anak perempuan berusia 16 tahun, dan saudaranya selamat namun dalam keadaan luka kritis. Angkatan Udara Israel mengebom bekas gedung keamanan Otoritas Palestina, sementara sekolah mereka terletak di sebelahnya.

Desak Pemerintah

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha mendesak supaya pemerintah mengajukan resolusi kepada DK PBB. Resolusi tersebut sangat penting mengingat masa keanggotaan tidak tetap Indonesia di DK PBB tinggal dua hari lagi.

“Kegiatan diplomasi harus ditingkatkan. Tinggal dua hari lagi Indonesia menjadi anggota tidak tetap, jadi harus dimanfaatkan. Kalau bisa membuat resolusi untuk mengecam Israel, walaupun saya ragu akan lolos, tetapi setidaknya sudah dicoba,” katanya ketika dihubungi SH di Jakarta, Selasa (30/12).

Mengingat perkembangan situasi di Gaza makin mencemaskan dan belum ada tanda-tanda Israel akan menghentikan aksi-aksi militernya, Presiden Yudhoyono mengimbau agar DK PBB segera mengeluarkan resolusi sehingga bisa memaksa Israel menghentikan aksi militernya terhadap Palestina.

“Indonesia berpendapat, DK PBB harus segera bersidang secara formal untuk mengeluarkan resolusi, agar bisa betul-betul memaksa Israel menghentikan serangan-serangannya. Dengan demikian, kedua belah pihak, Israel dan Palestina, bisa masuk kepada peace process (proses damai-red) sebagaimana yang kita saksikan, yakni terjadi gencatan senjata hampir setengah

tahun lamanya dan menciptakan keamanan yang baik pada waktu itu," jelas Presiden sesuai memimpin Rapat Kabinet Terbatas membahas perkembangan situasi di Gaza, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/12).

Pada bagian lain, Departemen Kesehatan segera mengirim bantuan berupa 2 ton obat-obatan dan dana US\$ 200.000 atau Rp 2,3 miliar ke Palestina sehubungan dengan serangan Israel yang mengakibatkan korban manusia.

"Ini merupakan bantuan kemanusiaan dari Indonesia bagi rakyat Palestina yang sedang menghadapi bencana kemanusiaan. Pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap penderitaan rakyat Palestina," demikian ujar Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari Selasa (29/12) di Jakarta.

Menurut Menkes, tidak benar bahwa pemerintah Indonesia hanya bisa mengomentari dan mengutuk serangan Israel di Jalur Gaza beberapa hari ini, seperti yang dikatakan beberapa pihak. "Pemerintah atas nama bangsa Indonesia akan sangat concern (peduli-red) terhadap korban yang terus berjatuhan. Pak Presiden juga akan mengirim bantuan uang tunai US\$ 1 juta dan perlengkapan medis," tegas Siti Fadilah.

Kepala Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Departemen Kesehatan Dr Rustam S Pakaya secara terpisah juga menjelaskan bahwa Departemen Kesehatan setelah berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri mempersiapkan pengiriman rumah sakit lapangan dan tenaga medis.

"Kami juga sedang mempertimbangkan mengirim rumah sakit lapangan, selain obat-obatan yang akan kita bawa dari Indonesia. Sebagian kebutuhan akan kita beli di negara terdekat dengan daerah bencana. Kemungkinan di Yordania," kata Rustam Pakaya sesuai pertemuan dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Paris Mehdawi, Senin. (Sinar Harapan)

2. RI Kirim Bantuan ke Palestina

Untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina akibat serangan Israel di Jalur Gaza, Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kesehatan akan menyerahkan bantuan uang Rp2 miliar dan obat-obatan sebanyak dua ton.

"Sebagai bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah terhadap penderitaan rakyat Palestina, kami juga akan menyumbang tiga unit ambulans," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen Kesehatan Lily S. Sulistyowati di Jakarta kemarin (30/12).

Menurut Lily, saat ini Departemen Kesehatan melakukan pengecekan harga di Arab Saudi agar bisa mengirimkan bantuan segera. Bantuan obat-obatan itu berupa antibiotik dan alat habis pakai sesuai kebutuhan korban perang. "Diharapkan dalam dua hari ini bantuan sudah dapat didistribusikan," ujar Lily.

Selanjutnya bantuan tenaga medis, dana tunai dan bantuan lain akan segera menyusul. Selain dari pemerintah, aksi solidaritas dan bantuan untuk Palestina juga datang dari berbagai kalangan. Lembaga swadaya masyarakat Medical Emergency Rescue (MER-C) misalnya, juga memberi bantuan medis.

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, Departemen Pertahanan sudah bersiap jika Perserikatan Bangsa-Bangsa membutuhkan pasukan perdamaian untuk menyelesaikan konflik Palestina.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak bangsa Indonesia mendoakan keselamatan rakyat Palestina karena Israel belum menunjukkan tanda-tanda menghentikan serangannya.

"Dengan doa tersebut, diharapkan pula hati para pemimpin dunia termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa terketuk untuk serius mengakhiri tragedi yang menimpa rakyat Palestina saat ini," kata SBY saat memberikan sambutan pada peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1430 Hijriyah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa (30/12).

Kepala negara mengajak semua pihak di dunia melakukan aksi nyata untuk memulihkan keadaan, menghentikan aksi militer Israel dan melanjutkan proses perdamaian Israel-Palestina. Menurut dia, Indonesia akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina menjadi negara berdaulat dan mandiri.

Menteri Sosial Bactiar Chamsyah mengatakan akan melakukan koordinasi dengan departemen terkait untuk penggalangan dana dan bantuan solidaritas kepada rakyat Palestina. "Saya harus koordinasi dengan Menteri Agama dulu, tentu kita tidak boleh terburu-buru karena ini lebih banyak bidang Menteri Luar Negeri. Kalau memang memerlukan penggalangan dana dari masyarakat, itu tugas Menteri Sosial," kata dia.

Pengiriman Pejuang

Menteri Agama Maftuh Basyuni mengimbau masyarakat Indonesia tetap tenang dalam menanggapi perkembangan di Palestina. "Tak perlu emosi, pengiriman mujahidin ke Palestina juga tidak mudah, cukup beri bantuan dan doa kepada Palestina," kata dia kemarin.

Menurut dia, langkah pemerintah menanggapi situasi terakhir di Palestina sudah cukup baik. "Yang terpenting kita sudah memberikan bantuan dan kita juga tegas perdamaian adalah jalan keluar yang paling baik."

Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan, Indonesia akan terus mendorong agar jalur-jalur perbatasan Palestina dibuka guna memudahkan akses masuk bantuan kemanusiaan ke negeri itu.

Menanggapi keinginan sejumlah ormas Islam untuk berjihad ke Palestina, Hassan mengimbau agar upaya meringankan penderitaan rakyat Palestina diwujudkan dengan bantuan kemanusiaan. "Tentunya niat baik itu juga harus disesuaikan dengan keadaan di wilayah tersebut di mana akses atau jalur untuk memasuki wilayah tersebut tidak mudah," kata Hassan. (Jurnal Nasional)

3. China Tempatkan RI di Papan Atas Hubungan Politik

Pemerintah China menempatkan Indonesia di papan atas dari mitra-mitra pentingnya dalam bidang politik, terlihat semakin baiknya hubungan bilateral kedua negara khususnya dalam lima tahun terakhir.

"Dalam lima tahun terakhir ini China telah menempatkan Indonesia di papan atas sebagai salah satu mitra penting dan strategis," kata Wakil Kepala Perwakilan RI untuk China Mohamad Oemar, di Beijing, Rabu.

Menurutnya, sejak dibukanya normalisasi hubungan kedua negara tahun 1990 hubungan bilateral kedua negara, khususnya bidang politik, telah berkembang dengan sangat pesat.

Apalagi dengan ditandatanganinya Kerjasama Strategis RI-China pada 2005 oleh Presiden Yudhoyono dan Presiden Hu Jintao sebagai landasan penting keinginan kedua negara untuk saling meningkatkan kerjasama di berbagai bidang.

Ia mengatakan, salah satu indikasi pentingnya Indonesia bagi China adalah seringnya sejumlah pejabat tinggi China yang berkunjung ke Indonesia untuk berbagai keperluan, baik itu pejabat tinggi partai Komunis China (CPC) dan terakhir kunjungan Wakil PM Li Keqiang yang juga bertemu dengan Presiden Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla.

Demikian pula sebaliknya, sejumlah pejabat Indonesia juga telah beberapa kali melakukan kunjungan ke China, seperti kunjungan Wapres Jusuf Kalla, ketua MPR, ketua DPR, ketua DPD, sejumlah menteri serta para pejabat tinggi lainnya termasuk petinggi partai politik.

"Jadi intinya adalah hubungan politik kedua negara saat ini berada dalam tataran yang tinggi dan masing-masing negara merasa saling membutuhkan dan memerlukan selain saling menghargai," kata Oemar.

Ia mengatakan terus membaiknya hubungan politik kedua negara adalah adanya saling menghormati serta tidak ingin campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara.

Untuk masalah Taiwan misalnya, Indonesia tetap berpijak pada *One China Policy* yakni tetap mengakui hanya terdapat satu China termasuk juga soal Tibet.

"Kebijakan diplomatik kita sudah tegas soal Taiwan yaitu *One China Policy* dan kita tidak pernah mencampuri urusan dalam negeri soal Taiwan juga Tibet," katanya menambahkan.

Demikian pula sebaliknya, tambahnya, pemerintah China juga tidak pernah sama sekali mencampuri urusan dalam negeri di Indonesia baik itu soal separatisme maupun konflik yang ada lainnya.

Ia berpendapat bahwa hubungan baik politik selama ini dan telah ditempatkan Indonesia di tataran atas sebagai mitra utama, perlu terus dijaga agar tetap kondusif di tahun-tahun mendatang. (ANTARA)

4. Indonesia Usulkan Reformasi Sistem Keuangan Global

Pertemuan puncak para pemimpin negara G-20 yang berlangsung di Washington DC, 15 November lalu, membuahkan sejumlah kesepakatan untuk meneruskan berbagai upaya dan langkah nyata yang diperlukan guna menstabilkan sistem keuangan dunia.

G-20 juga sepakat untuk menyetujui kebijakan yang diperluas dalam kerja sama makro ekonomi guna memperbaiki pertumbuhan dan mendukung ekonomi negara berkembang dan negara maju.

Kesepakatan lain dalam pertemuan G-20 tingkat pemimpin negara yang pertama kali ini adalah untuk bersama mengenali pentingnya dukungan kebijakan moneter yang dianggap cocok bagi kondisi domestik, menggunakan sisi fiskal untuk merangsang permintaan domestik dalam mempercepat efek, serta membantu negara ekonomi maju dan berkembang mendapatkan akses keuangan dalam kondisi likuiditas yang sulit ini.

G-20 juga sepakat untuk mendorong Bank Dunia dan lembaga keuangan multilateral lainnya untuk menggunakan kapasitas keuangan mereka secara penuh dan mendukung dikeluarkannya berbagai fasilitas baru dari Bank Dunia, serta memastikan kembali bahwa IMF, Bank Dunia dan lembaga keuangan lainnya memiliki sumber dana yang cukup untuk melanjutkan perannya dalam upaya menangani krisis.

Pemimpin ke-20 negara itu juga sepakat akan bertemu kembali pada 30 April 2009 mendatang. KTT itu kemungkinan akan dilakukan di Inggris atau Jepang, sebagaimana diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah pertemuan itu, seperti dilaporkan kantor berita Antara.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam jumpa pers usai pertemuan itu meminta untuk tidak berharap banyak bahwa kesepakatan G-20 ini bisa menyelesaikan semua persoalan krisis keuangan dengan cepat.

Namun demikian, pertemuan puncak seperti ini, kata Presiden Yudhoyono, tetap dibutuhkan apalagi para kepala negara itu sepakat untuk bekerja lebih erat lagi dalam menyelesaikan krisis.

"Kita tidak boleh memiliki ekspektasi yang berlebihan terhadap apa yang bisa dilakukan dunia dan dilakukan kawasan untuk mengatasi permasalahan perekonomian yang dihadapi oleh tiap-tiap negara. Penilaian saya terhadap pertemuan puncak ini, karena saya sering menghadiri pertemuan puncak serupa, menurut saya memberikan kepastian langkah-langkah yang perlu kita lakukan ke depan. Saya merasakan bahwa komitmen dari para pemimpin yang ada di dalam forum G-20 ini cukup kuat untuk bersama-sama mengatasi krisis keuangan global," katanya.

Revitalisasi

Mengenai usulan Indonesia untuk membentuk Global Expenditure Support Fund (GESF) yang akan membantu anggaran pembangunan negara-negara emerging market yang terkena dampak krisis keuangan global, menurut Presiden, bisa diterima oleh para peserta G-20 dan dimasukkan dalam poin-poin pada deklarasi yang dikeluarkan.

"Mengenai mekanismenya seperti apa, kita terus matangkan pelaksanaannya, dan berapa banyak. Jadi tidak perlu menunggu pertemuan puncak berikutnya untuk lembaga multilateral yang menghimpun dana dari negara-negara tertentu yang mengalami surplus," katanya.

Menurut Presiden, dalam deklarasi itu ukuran-ukuran usulan Indonesia sudah ada, meski rumusannya tidak sama dengan usulan awal. Namun, isi dan substansinya sudah termuat.

"Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita terus mendorong terus memastikan kelanjutannya. Pertemuan saya yang bersifat bilateral tadi yang tiga kali untuk meyakinkan setelah ini diterima formatnya masuk bagaimana implementasinya," katanya.

Presiden Yudhoyono, saat di Washington DC menyempatkan melakukan tiga pertemuan bilateral dengan PM Jepang Taro Aso, PM Australian Kevin Rudd dan Presiden Bank Dunia Robert Zoelick.

Dikatakan Presiden, usulan mengenai pembentukan GESF ini selain untuk menyumbangkan kepada dunia guna membantu solusi penyelesaian krisis keuangan juga untuk kepentingan Indonesia sendiri dalam menjaga tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditargetkan, tetapi kemungkinan akan terhambat akibat pengaruh krisis keuangan ini.

Tiga pertemuan bilateral yang dilakukannya, lanjut Presiden, berkaitan dengan kepentingan Indonesia untuk menjaga kemampuan belanjanya, menjaga APBN, serta menjaga tujuan-tujuan pembangunan.

"Kalau ada kesulitan di dalam mendapatkan sumber pembiayaan setelah sumber sendiri digunakan maka pihak-pihak itu telah berkomitmen untuk memberikan dukungan dan kerja samanya," katanya.

Dijelaskan pula bahwa pertemuan bilateral itu bukan hanya sepakat untuk menentukan langkah-langkah global menangani krisis, tetapi juga untuk kepentingan nasional utamanya guna memastikan bahwa Indonesia memiliki cadangan mendapatkan sumber-sumber pendanaan dalam menghadapi krisis keuangan.

"Kita (G-20) sepakat bulan April akan bertemu lagi, tempatnya di Inggris atau Jepang. Tetapi yang lebih penting lagi dari sekarang sampai April para menteri keuangan, dan semua jajaran

pemerintah di semua negara harus mengimplementasikan, mempersiapkan dan menindaklanjuti apa yang telah kita sepakati dalam pertemuan puncak ini," kata Presiden.

GESF dan IMF

Ide untuk mengusulkan GESF, sebenarnya sangat menguntungkan bagi kepentingan Indonesia yang ekonominya juga sangat terancam dampak krisis keuangan ini. Apalagi Indonesia sudah tidak lagi menjalin ikatan dengan IMF, sehingga apabila krisis keuangan membuat perekonomian Indonesia goyah, dengan turunnya cadangan devisa, Indonesia tidak bisa lagi meminjam dari IMF untuk mengamankan balance of payment.

Presiden Yudhoyono saat di Washington mengatakan dirinya tidak akan pernah lagi meminta bantuan kepada IMF jika kondisi ekonomi Indonesia semakin parah sebagai dampak krisis keuangan ini.

"Jadi rasional dari posisi dan sikap kita ke depan tidak kembali memilih format seperti kita dulu kerja sama Indonesia dengan IMF. Dengan Letter of Intent (LoI) dengan kondisionalitas yang sangat ketat yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi yang berlaku," katanya.

Dikatakan Presiden, Indonesia mempunyai pengalaman selama sepuluh tahun berhubungan dengan IMF yang dinilai tidak tepat, sehingga pada saat krisis keuangan seperti ini sebaiknya Indonesia tidak lagi bekerjasama dengan IMF.

Namun, Presiden juga mengatakan bahwa langkah yang paling efektif untuk mengatasi permasalahan ekonomi di dalam negeri adalah upaya domestik menggunakan sumber daya yang dimiliki.

"Mari kita gunakan resources kita sendiri, sumber dana kita sendiri, upaya sendiri, untuk memulihkan keadaan ini. Sejumlah sumber daya masih kita miliki seperti reserve kita di BI dibandingkan waktu lalu masih cukup kuat," katanya.

Selain itu, juga masih ada dana-dana "nganggur" di daerah yang nilainya mencapai Rp 75 triliun, yang seharusnya bisa digunakan untuk menggerakkan sektor riil dan dunia usaha.

"Kita harus all out menggunakan sumber-sumber yang kita miliki untuk menggerakkan ekonomi kita meskipun keadaan sulit. Namun demikian, ada kesulitan kredit, kesulitan likuiditas, serta sumber-sumber yang lebih besar lagi. Bukan hanya untuk menutup defisit, tapi untuk mendorong pertumbuhan di masa yang sulit ini. Oleh karena itulah kerja sama (bilateral dan G-20) seperti ini sangat diperlukan," katanya. (Suara Karya)

5. EKONOMI KAWASAN: Indonesia Berpeluang dalam Krisis

Dampak krisis global yang akan dialami Indonesia diperhitungkan tak sedalam dampak krisis pada beberapa negara ASEAN lainnya. Krisis diyakini menjadi peluang untuk membenahi perekonomian domestik serta memperkuat perdagangan regional.

Pandangan itu dikemukakan Prof David O Dapice dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, yang menjadi pembicara tunggal dalam pertemuan eksekutif bertajuk "ASEAN and the Global Recession" di Jakarta, Selasa (30/12).

David mengecualikan Singapura, Brunei, Myanmar, Kamboja, dan Laos dalam analisis yang disampaikannya.

Ia menekankan, penurunan harga komoditas, ekspor, pariwisata, aliran modal, serta remitansi memang dipastikan memukul perekonomian Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Namun, beberapa kondisi membuat perekonomian Indonesia diperkirakan berada dalam situasi lebih baik.

Ekspor menyumbang 35 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Adapun kontribusi ekspor mencapai 70 persen atau lebih terhadap PDB Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Di Filipina, ekspor menyumbang sekitar 50 persen dari PDB.

Penurunan ekspor komoditas akan menekan pendapatan petani. Sementara berkurangnya ekspor produk manufaktur akan menaikkan angka pengangguran.

Sekitar 50 persen dari produk ekspor Indonesia dan Vietnam berupa produk manufaktur. Di negara ASEAN lain, produk manufaktur mencapai 75 persen atau lebih dari total ekspor.

Dampak pelemahan aliran investasi asing langsung dan modal portofolio di Indonesia juga diperhitungkan tak sedalam negara ASEAN lain. Rasio aliran modal terhadap PDB di Indonesia selama ini terhitung paling rendah, yakni sekitar 7 persen.

Di Vietnam, aliran modal asing hampir mencapai 10 persen dari PDB. Di Thailand mendekati 12 persen, di negara ASEAN lain bahkan di atas 15 persen.

Rasio kapitalisasi pasar modal terhadap PDB di Vietnam dan Indonesia sama-sama di bawah 30 persen. Adapun di Filipina sekitar 40 persen, di Thailand 70 persen, dan lebih dari 130 persen di Malaysia. "Artinya lebih banyak yang kehilangan uang di Thailand dan Malaysia daripada di Indonesia," ujar David.

Pangan dan energi

Gejolak harga minyak dan pangan, menurut David, membuat banyak negara berpikir ulang tentang kemampuan mencukupi sendiri kebutuhan pangan dan energi. Upaya untuk menjamin akses terhadap sumber daya pangan dan energi juga meningkat.

"Perdagangan bebas sebenarnya menyediakan harga lebih murah bagi pemenuhan kebutuhan ketimbang akuisisi neokolonial. Namun, mungkin bobot keamanan suplai sekarang ini menjadi lebih besar," ujarnya.

Inisiatif mengamankan suplai pangan dan energi akan berkait dengan pemanasan global dan isu lingkungan. Karena itu, pengembangan teknologi baru, pendidikan, dan riset makin dibutuhkan bagi penguatan ekonomi. David menekankan, kondisi makroekonomi yang baik di ASEAN, kecuali di Vietnam, serta kekayaan sumber daya membuat kawasan ini berpotensi membangun intra- perdagangan yang kuat.

"Krisis seharusnya tidak disia-siakan. Gunakanlah krisis itu untuk memperbaiki infrastruktur, mengalokasikan subsidi secara lebih tepat, dan membuat perubahan lain yang dibutuhkan," ujarnya. (Kompas)

6. LAPORAN EKONOMI INTERNASIONAL: Era Kegelapan Menghantui Dunia

Memasuki tahun 2009, pertanyaan yang muncul di benak warga dunia ternyata serempak: mampukah dunia keluar dari krisis finansial? Ini karena kekurangan finansial bagi sejumlah negara akan berakibat langsung terhadap warga negaranya. Apabila hal ini dibiarkan terjadi, maka bisa dipastikan dunia akan penuh dengan tindakan yang anarkis.

Sekjen PBB Ban Ki-moon pada konferensi ekonomi dan pembangunan yang diadakan di Doha, Qatar, pekan lalu, telah mengingatkan hal tersebut.

Ban mengungkapkan, jika krisis finansial ini tidak ditangani secara tepat, maka ia akan menjelma menjadi krisis kemanusiaan di kemudian hari. "Kerendahan sosial dan ketidakstabilan politik akan makin meningkat. Hal ini akan memperparah persoalan lainnya. Rangkaian berikutnya adalah saling menghantam dan menghancurkan semua pihak," demikian Ban mengingatkan.

Krisis finansial yang dimulai dengan runtuhnya sistem, manajemen, dan pasar keuangan Amerika Serikat (AS) ini telah memberikan dampak langsung terhadap negara-negara lain, terutama yang memiliki hubungan ekonomi serta menggunakan mata uang dolar AS (greenback) sebagai patokan mata uangnya.

Memang, harus pula diakui bahwa memburuknya perekonomian AS telah berakibat pada turunnya harga minyak dunia yang hampir 50 persen dari produksinya setiap hari disedot oleh industri AS.

Namun, hal ini pun akan menimbulkan masalah baru lagi, karena adanya persaingan untuk memperebutkan sumber daya alam yang tak dapat diperbarui antara negara-negara industri seperti Jepang, China, Rusia, Korea Selatan, dan kawasan Eropa.

Selama ini kekuatan AS memang tampak masih dominan, namun dengan kondisi memburuknya finansial dunia, mungkinkah AS memainkan peran yang lebih lagi? Tampaknya mustahil untuk melakukan hal itu. Sebab, semua negara saat ini meminta perlakuan yang sama di mata dunia internasional.

Ekonom PBB, Rob Vos, mengatakan, kondisi demikian akan mengakibatkan produk domestik bruto global runtuh sedikitnya 0,4 persen atau mengalami kondisi yang paling buruk sejak 1930. Paling tidak, dunia akan memasuki era kegelapan (darkness).

Skenario optimistis menunjukkan PDB global tumbuh 1,6 persen, turun dari pertumbuhan 2,5 persen pada 2008 dan lebih buruk dari 3,5-4 persen empat tahun sebelumnya. Skenario medium, PDB global tumbuh hanya 1 persen. Semua skenario memperlihatkan dunia sedang memasuki tahun 2009 yang kelam.

Untuk mengurangi kemiskinan global sebesar satu persen, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen. Anjloknya PDB global akan menambah kemiskinan. Inilah ketakutan PBB tersebut.

Krisis sekarang ini menimpa negara-negara termaju, seperti AS, Eropa, dan Jepang, penyerap utama permintaan dunia. Namun, hal ini berdampak dahsyat terhadap berbagai

negara, di mana dunia sudah saling terkoneksi. Kaum termiskin dunia, sebagaimana dikatakan Ban Ki-moon, adalah yang paling terpukul. Penurunan bantuan internasional adalah satu hal yang sudah pasti.

Stimulus ekonomi yang sudah digelontorkan oleh AS, Inggris, negara kawasan Eropa, Prancis, Jepang dan Korsel tampaknya tidak mampu mendongkrak keterpurukan pasar uang internasional yang sudah telanjur tengkurap.

Antisipasi lain adalah melakukan efisiensi produksi atau pengurangan produksi yang berdampak pada biaya yang harus dikeluarkan oleh sebuah perusahaan agar dapat terus melakukan produksinya.

Tiga industri otomotif besar di AS, Chrysler Company, General Motors dan Ford, telah berteriak minta tolong kepada pemerintah untuk bisa memperoleh dana talangan (bailout) namun, siapa yang menyangka Senat AS akhirnya justru menolak untuk memberikan bantuan itu.

Kondisi ini juga diikuti oleh produsen otomotif Jepang seperti Toyota, Honda, dan Nissan yang akan mengurangi produksi serta memangkas pabriknya di beberapa negara.

Belum lagi produsen manufaktur dan elektronika terkemuka seperti Sony, Toshiba dan Sanyo yang sudah sejak November 2008 mengungkapkan bakal menutup sejumlah pabriknya di beberapa negara serta melakukan serangkaian pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk menyelamatkan usahanya.

Jelas sudah hubungannya antara krisis finansial dan pelemahan produksi. Kesulitan keuangan menyebabkan sejumlah industri dan perusahaan harus melakukan penghematan yang superketat. Penghematan itu bisa dilakukan dengan mengurangi produksi. Pengurangan produksi artinya mengurangi pekerja dan menutup sejumlah pabrik.

Situasi ini pun masih diperparah dengan permintaan dan daya beli masyarakat internasional yang terus akan mengalami penurunan tahun 2009. Akibatnya jelas, industri lain dalam jasa keuangan yaitu perbankan bakal makin hati-hati (prudent) dalam menggelontorkan kreditnya kepada nasabah.

Seperti diketahui, penggerak utama perekonomian dalam sebuah negara adalah sektor riil. Bagaimana kondisi negara itu, jika industrinya tidak bergerak?

Awal Desember 2008, ANZ Bank melansir bahwa dampak krisis ekonomi global tidak akan sama terhadap negara-negara di Asia.

Menurut ekonom dari ANZ Bank, pertumbuhan kawasan Asia turun dari 9 persen menjadi 6,25 persen pada 2009. Menurut lembaga pemeringkat Standard & Poors, pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik juga akan melemah. (Suara Karya)

I | | .

NASIONAL :

A. POLITIK :

1. MUI urges Muslims to boycott U.S. products

The Indonesian Ulema Council (MUI) has urged all Indonesian Muslims to boycott U.S.-made products, to push president-elect Barrack Obama to halt the Israeli attacks on Gaza.

Boycotting U.S. products was a way for Indonesia to pressure the United States to stop conflicts between Israel and Palestine's Hamas group, MUI fatwa commission chairman Ma'ruf Amin said Tuesday .

"Israel ... will only be afraid of the U.S., so all Muslims must urge Obama to intervene and overcome the conflict," Ma'ruf said.

The MUI hoped Obama would not follow in the footsteps of his predecessor, George W. Bush, who had failed to adopt a neutral stance in the Israeli-Palestinian conflicts, he said.(The Jakarta Post)

B. EKONOMI :

1. Pemerintah Jajaki Ekspor Beras 2009

Pemerintah akan menjajaki kemungkinan ekspor beras pada 2009 menyusul tercapainya swasembada dan surplus produksi beras dalam negeri tahun ini.

"Tahun 2009 mungkin ada penajakan seperti itu (ekspor beras)," kata Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan, Bayu Krisnamurthi di Gedung AA Maramis Depkeu Jakarta, Rabu.

Menurut Bayu, dalam pengalaman sebelumnya, Indonesia juga pernah mengekspor beras ke luar negeri di antaranya Afrika ketika produksi beras surplus.

"Sekarang ketika kita mau mengekspor beras kita, respon dari mereka adalah menanyakan apakah Indonesia akan kontinyu mengekspor beras," katanya.

Bayu mengakui bahwa pemerintah akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri ketimbang ekspor sehingga ekspor harus dipertimbangkan secara teliti.

"Namun pengalaman selama ini, impor beras dilakukan secara terbatas yaitu untuk jenis beras khusus yang tidak dihasilkan Indonesia," katanya.

Bayu menyebutkan, sejak 2005, pemerintah telah menerbitkan 4 kali kebijakan perberasan dalam bentuk Inpres dan terakhir Inpres nomor 8 tanggal 24 Desember 2008.

Pada 2007, terjadi peningkatan produksi hingga 4,9 persen dan tahun 2008 sebesar 5,5 persen sehingga Indonesia diperhitungkan telah mencapai swasembada beras dengan memproduksi 38,6 juta ton beras dengan kebutuhan konsumsi dan stok dalam negeri sekitar 37 juta ton.

Juga ada stabilitas harga beras dalam negeri pada saat terjadi gejolak harga pangan dunia selama 2008. Data selama 2008 menunjukkan bahwa tingkat fluktuasi harga di luar negeri untuk beras umum 112 kali lebih besar dibanding harga dalam negeri dan untuk beras medium di luar negeri 31 kali lipat lebih fluktuatif dibanding dalam negeri.

"Stok pemerintah yang dikelola Bulog pada akhir 2008 mencapai 1,4 juta ton, dalam bentuk beras kualitas medium maupun premium," kata Bayu.

Pemerintah juga telah menyalurkan beras bersubsidi bagi 19,1 juta rumah tangga sasaran dengan penyaluran sebanyak 3,16 juta ton per 22 Desember 2008.(ANTARA)

2. 5 Pelabuhan Telah Disetujui

Sebanyak lima pelabuhan di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun, akan menjadi kawasan perdagangan bebas mulai 1 Januari 2009.

Lima pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Batu Ampar, Pelabuhan Sekupang, Pelabuhan Citra Nusa Kabil di Pulau Batam, Pelabuhan Malarko di Pulau Karimun, dan Pelabuhan Lobam di Pulau Bintan. "Lima pelabuhan ini adalah yang telah mendapatkan persetujuan semua departemen untuk menyelenggarakan perdagangan bebas," kata Direktur Kepelabuhanan dan Pengerukan Departemen Perhubungan (Dephub) Cholik Kirom di Jakarta kemarin.

Cholik menjelaskan, pihaknya sebenarnya mengusulkan 25 pelabuhan yang akan dilakukan untuk kawasan ekspor-impor, tapi baru lima pelabuhan yang sudah keluar izinnya. Sementara untuk pelabuhan lainnya masih menunggu penetapan dan koordinasi antardepartemen untuk dapat menetapkan lokasi-lokasi pelabuhannya.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga sedang menyiapkan adanya otoritas pelabuhan (OP) di wilayah Indonesia. Hal ini terkait telah dikeluarkannya Undang-Undang (UU) No 17/2008 tentang Pelayaran yang memisahkan fungsi regulator dan operator. Otoritas ini diharapkan dapat diwujudkan paling lambat pada Mei 2009. "Otoritas ini yang akan mengatur koordinasi antarpelabuhan di sekitarnya," tambahnya.

Satu Atap

Di sisi lain, Dephub juga berencana membangun sistem pelayanan kegiatan pelayaran dalam satu atap di lima pelabuhan utama pada 2009, yakni di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Pelabuhan Belawan Medan, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar.

"Pembangunan pelayanan satu atap ini untuk memberikan pelayanan yang baik di pelabuhan," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut Dephub Sunaryo. Untuk mengawasi rencana tersebut, pelayanan perizinan satu atap di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak saat ini tengah dibangun.(Koran Sindo)

3. Negosiasi Tangguh Dilanjutkan

WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengatakan, negosiasi kontrak ekspor gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) Tangguh ke China akan dilanjutkan Januari 2009.

"Nanti, Januari 2009, kita perbarui (negosiasi)," kata Jusuf Kalla saat meninjau proyek LNG Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, kemarin. Sebelumnya, Wapres

mengatakan, kontrak LNG Tangguh ke China akan dilakukan negosiasi ulang sebab kontrak yang ada dirasa sangat merugikan Indonesia.

"Kita ingin membicarakan bukan hanya soal harga, tetapi formulanya. Yang jelas negosiasi jalan terus," katanya. Pengamat perminyakan Kurtubi menilai, proses renegotiasi formula harga LNG Tangguh harus tetap berjalan meski harga minyak telah jatuh ke level USD30 per barel. (Koran Sindo)

4. Tahun Indonesia Kreatif 2009: Krisis Jadi Peluang bagi Ekonomi Kreatif

Saat krisis finansial Asia menghantam Indonesia pada 1998, Ardian Elkana mulai mengekspor produk animasi ke Amerika Serikat. Pada saat yang sama, Tonton Taufik memulai pemasaran mebel melalui internet. Hingga kini teknik pemasaran kreatif itu terus ia kembangkan, hingga ekspor mebel itu menembus lebih dari 50 negara.

Bagi Budiman, seorang arsitek, krisis 1998 juga mendatangkan berkah karena rencana pengembangan menara-menara yang semula ditangani arsitek asing dialihkan ke arsitek lokal. Bahan lokal untuk interior dan konstruksi pun lebih banyak dimanfaatkan.

Berangkat dari krisis 1998, sampai saat ini bisnis para pengusaha itu terus berkembang. Menghadapi krisis yang akan datang lagi, satu pesan penting mereka sampaikan: krisis adalah peluang untuk mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif.

"Sepanjang sejarah dunia, perfilman selalu berkembang pada saat krisis, kebutuhan orang mencari hiburan tak berkurang. Perfilman itu bisnis yang tahan krisis," ujar Mira Lesmana, produsen film laris manis Laskar Pelangi.

Di Indonesia, perfilman sebagai bagian dari kegiatan ekonomi kreatif memang sedang berkembang pesat. Mira mencatat, pada 1998, film Indonesia hanya dinikmati oleh 1 persen penonton bioskop. Saat ini, pangsa pasar film Indonesia berkembang, merebut 58 persen dari sekitar 45 juta penonton di bioskop.

"Masih banyak yang perlu dilakukan untuk mengembangkan perfilman Indonesia dan membuatnya bisa menembus pasar internasional. Saya yakin, krisis sekarang tidak menghalangi pengembangan itu," ujar Mira.

Untuk jenis produk kreatif yang berbeda, Tonton Taufik berpendapat senada dengan Mira. Pengusaha mebel ini mengaku sangat jarang mengikuti pameran, tetapi ia berhasil terus memperluas pasar ekspor untuk produknya, berkat pemasaran melalui internet.

"Dengan teknik pemasaran yang kreatif ini, tidak ada low season, bahkan pada saat krisis," ujarnya.

Tonton mengingatkan, di China sekitar 200 juta penduduk saat ini diperkirakan paham teknik promosi lewat internet. Adapun di Indonesia, baru sekitar 25 juta orang yang diperkirakan kenal internet, belum termasuk pemahaman bagaimana berjualan dengan internet.

Perlu keberpihakan

Krisis selalu menandai datangnya momentum untuk menjadikan potensi ekonomi domestik sebagai tumpuan pertumbuhan. Indonesia bukan saja kaya dengan sumber daya alam, tetapi juga dilimpahi keragaman latar sosial budaya. Dari situ, tak terbatas ide kreatif bisa digali.

Ekonomi kreatif didasarkan pada pengolahan atas ide, kreativitas, dan keterampilan individual untuk mengembangkan perekonomian berkelanjutan. Sejumlah 14 subsektor diidentifikasi sebagai industri kreatif, antara lain periklanan, arsitektur, kerajinan, desain, fashion, film, musik, seni pertunjukan, percetakan dan penerbitan, serta radio dan televisi.

Pemerintah telah merampungkan penyusunan cetak biru pengembangan ekonomi kreatif dengan target program dan pencapaian hingga 2025. Bersamaan dengan peringatan Hari Ibu 22 Desember 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan tahun 2009 sebagai Tahun Indonesia Kreatif.

Tentang penancangan itu, Poppy Dharsono, pendiri Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI), mengatakan, kampanye produk industri kreatif memang mesti didukung. Namun, banyak persoalan riil yang belum tersentuh ketika pemerintah sibuk dengan penyusunan konsep.

"Department store selama ini selalu memprioritaskan pengalokasian tempat untuk produk luar negeri. Kalau sedang masa krisis, produsen dalam negeri diminta mengisi prime space. Begitu keadaan membaik, kami digeser lagi ke posisi pinggir walaupun penjualan sebenarnya bagus," ujar Poppy.

Sistem pembelian produk fashion lokal juga berbeda dengan produk impor. Merek-merek mahal dari luar negeri dibeli putus, sedangkan produk lokal dibeli dengan konsinyasi. Dengan

begitu, produsen fashion lokal yang sebagian besar pengusaha kecil harus memiliki modal kerja sedikitnya untuk 6-9 bulan setelah melepas produknya ke pasaran.

Pemerintah tentu tak cukup sekadar mengimbuai agar pusat perbelanjaan memberi ruang dan perlakuan yang lebih mendukung pada produsen lokal. Di berbagai negara di mana industri kreatif berkembang pesat, keberpihakan pemerintah tertuang melalui regulasi. Pengusaha kecil tidak dibiarkan bertarung sendiri dengan pemodal besar yang tentu selalu diuntungkan dalam mekanisme pasar bebas.

Saat ini 14 subsektor industri kreatif di Indonesia diperkirakan telah menyerap 5,4 juta tenaga kerja dengan kontribusi terhadap perekonomian diperkirakan mencapai sekitar Rp 112 triliun pada 2007. Sekali lagi, perlu diingat bahwa industri kreatif tumbuh dari usaha berskala kecil yang hampir semuanya dimotori orang muda.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengakui, pemerintah, dunia usaha, dan kalangan terdidik perlu bekerja sama lebih erat untuk membangun iklim kondusif bagi pengembangan ekonomi kreatif.

Hak kekayaan intelektual

Kerja sama dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memastikan penguasaan kemampuan kreatif itu semakin meluas. Pengembangan industri kreatif juga memerlukan iklim lebih kondusif, antara lain terkait hak kekayaan intelektual dan fasilitas ruang publik.

Pengenalan dan apresiasi terhadap warisan budaya, insan kreatif, dan produk-produk kreatif juga perlu diperluas. Makin luas pengenalan dan apresiasi itu, akan makin luas pula pasar dan dukungan finansial bisa didapat pelaku industri kreatif.

Infrastruktur teknologi dan komunikasi pun mendesak terus diperkuat untuk mendukung pengembangan industri kreatif. Dukungan lain yang tak kalah penting adalah kemudahan akses permodalan, baik dari perbankan maupun lembaga keuangan nonbank bagi para pelaku industri ini.

Tidak sebatas anggaran

"Cetak biru pengembangan industri kreatif ini disusun dengan program aksi pada masing-masing departemen. Bantuan pemerintah untuk pengembangan industri kreatif tentu bukan sebatas anggaran untuk insentif, tetapi misalnya juga termasuk sosialisasi pada perbankan untuk mendukung pembiayaan pelaku industri kreatif dan pengembangan database," ujar Mari.

Database yang mengidentifikasi pelaku industri kreatif itu rencananya disusun dan mulai dapat diakses secara luas pada 2009. Dengan database tersebut, dapat dibentuk jaringan kerja sama yang lebih luas antarpelaku industri kreatif.

Pendesain interior sebuah hotel, misalnya, diharapkan lebih mudah memanfaatkan produk kerajinan berbahan lokal dengan memanfaatkan database itu. (Kompas)

C. SOSBUD

1. RAKORNAS BNP2TKI 2011, TKI Akan Kuasai Pasar Tenaga Kerja di Timteng

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) formal dan informal diperkirakan mampu mengisi sebagian besar pasar tenaga kerja di Timur Tengah (Timteng) dalam 2-3 tahun mendatang.

Negara-negara di Timteng tersebut membutuhkan banyak tenaga kerja untuk penatalaksana rumah tangga (PRT) serta sektor jasa konstruksi, perawat, dan lainnya. Apalagi TKI mendapat prioritas terkait kesamaan latar belakang agama, budaya, dan terkenal sebagai pekerja keras.

Demikian pernyataan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BNP2TKI di Jakarta, Selasa (30/12).

"Peluang pasar tenaga kerja asing di negara-negara Timteng masih sangat terbuka. Apalagi TKI merupakan pekerja yang diminati perusahaan atau perorangan di Timteng karena keuletan dan keramahannya," kata Jumhur.

Menurut dia, permintaan TKI formal di Timteng kebanyakan untuk sektor konstruksi, manufaktur, perminyakan, perhotelan, rumah sakit, serta tenaga kesehatan (spa therapy).

"Permintaan TKI di Timteng mencapai ribuan orang untuk setiap tahunnya. Dengan demikian, kita juga harus meningkatkan kualitas calon TKI agar bisa dapat bersaing dengan tenaga kerja asing dari negara lainnya," tuturnya.

Untuk tenaga perawat, lanjut Jumhur, di Yordania misalnya, membutuhkan 2.000 orang. Sedangkan pekerja konstruksi 1.000 orang. Ini belum lagi untuk sektor perminyakan dan sektor-sektor lain. "Kami yakin Indonesia bisa merebut pasar tenaga kerja di negara-negara tersebut, karena para perusahaan penyalur tenaga kerja di Timteng menyatakan TKI lebih disukai di sana," ujar Jumhur lagi.

Demikian juga dengan Suriah. Menurut Jumhur, kini sudah 80.000 TKI mengadu nasib di negara tersebut sebagai penata-laksana rumah tangga.

"Dalam waktu dekat kami akan memasukkan TKI formal untuk bekerja di sektor konstruksi, perawat, dan manufaktur. Ini sudah dibicarakan dengan Pemerintah Suriah dan perusahaan penyalur tenaga kerja asing di negara tersebut," ucapnya.

Meski demikian, lebih jauh Jumhur menjelaskan, terdapat kendala dalam mengisi pasar tenaga kerja asing di Timteng tersebut.

Saingan terberat untuk merebut pasar datang dari Mesir, Filipina, India, dan Pakistan.

"Keoptimisan saya untuk merebut pasar tenaga kerja migran ini muncul setelah beberapa perusahaan penyalur tenaga kerja asing berskala besar mengatakan bahwa negara-negara pesaing tersebut sudah mulai kurang diminati pengguna jasa. Ini karena kemampuan yang terbatas serta permintaan gaji yang tinggi," katanya.

Sedangkan kelemahan para TKI hanyalah dari segi penguasaan bahasa asing. "Untuk itu, kami sekarang mengunci semua balai latihan kerja (BLK) swasta untuk benar-benar melatih TKI selama 200 jam sebelum mereka siap diberangkatkan. Pelatihan meliputi keterampilan bahasa dan bidang pekerjaan," katanya.

Sebelumnya sebanyak 35.000 TKI ilegal di Yordania disepakati "diputihkan" menjadi legal. Para wakil agen Yordania mempersoalkan sebutan TKI ilegal yang disampaikan pihak Indonesia. Ini karena semua TKI yang bekerja di negara tersebut justru masuk kategori legal, berdasarkan hukum setempat.

Namun, pihak Indonesia bersikukuh sepanjang TKI tidak bekerja atas dasar kontrak kerja yang jelas, tidak mengikuti ketentuan undang-undang, dan tidak melapor ke kedutaan, maka mereka masuk kategori ilegal.

Sementara itu, sekitar 70.000 TKI ilegal di Suriah juga akan "diputihkan" dengan cara melengkapi mereka dengan dokumen sehingga menjadi legal.

Dengan dilakukannya pemutihan, para TKI akan bekerja berdasarkan kontrak dengan agensi di Suriah yang didukung pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) selaku agen pengirim di Tanah Air, termasuk diketahui KBRI Suriah dan BNP2TKI.

Mereka juga akan mendapat perlindungan asuransi yang nilai preminya mencapai 50 dolar AS yang dibayar oleh pemberi kerja di Suriah. Sehingga, kalau ada masalah, para TKI bisa mencairkan asuransinya. (Suara Karya)

D. HANKAM :

1. South Korea buys Indonesian aircraft for coastguard

South Korea has signed a 90-million-dollar deal with Indonesia to buy four transport planes for the coastguard, officials said Tuesday.

Under the deal signed on Monday, Indonesia will deliver four CN235-110 aircraft by 2011, the Defense Acquisition Programme Administration said.

"They will be used for various missions," a spokesman told AFP, adding the plane, which is equipped with an advanced radar system, is already used by South Korea's air force.

Yonhap news agency said the coastguard would use the Indonesian aircraft to patrol waters around a group of Seoul-controlled islands midway between South Korea and Japan.

Called Dokdo in Korea and Takeshima in Japan, the tiny islands have for decades been a flashpoint in relations, with both sides claiming sovereignty.

Japan claimed them in 1905 after winning a war with Russia. It went on to annex the entire Korean peninsula from 1910 until its World War II defeat in 1945.

Seoul has taken measures to cement its claims to the islands, including staging a military exercise nearby. A small South Korean police contingent is stationed on them. (ANTARA)

E. HUKUM :

1. Pemberantasan Korupsi: KPK Selamatkan Rp 190 Miliar Selama 2008

Melalui Tim Penertiban Barang Milik Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi selama tahun 2008 berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp 190 miliar. Dalam kerjanya, tim tersebut tidak hanya berkoordinasi, tetapi juga memonitor dan menyupervisi pelaksanaan inventarisasi penertiban barang milik negara.

Obyek inventarisasi itu, antara lain, terdapat di berbagai kementerian, lembaga negara, badan usaha milik negara, dan pemerintah daerah.

Dalam jumpa pers, Selasa (30/12) di Jakarta, Ketua KPK Antasari Azhar mengatakan, capaian itu belum termasuk dengan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 410 miliar lebih yang disetor KPK ke kas negara.

PNBP itu, antara lain, berasal dari penanganan kasus perkara korupsi dan gratifikasi. Rinciannya, antara lain, Rp 390 miliar lebih berasal dari uang pengganti yang ditetapkan pengadilan, lalu uang rampasan sebesar Rp 8,1 miliar lebih, dan uang sitaan yang telah ditetapkan pengadilan sebesar Rp 4,2 miliar lebih.

Dalam kinerjanya selama tahun 2008, KPK memperoleh 259 laporan gratifikasi. Atas laporan tersebut, KPK memeriksa 111 laporan karena dugaan adanya tindak pidana korupsi. Selain itu, selama tahun 2008, KPK juga telah menerima 8.479 pengaduan.

Selama tahun 2008, KPK telah menelaah 8.005 pengaduan dan hasilnya sebanyak 1.651 pengaduan mengandung indikasi korupsi. Sisanya sebanyak 6.354 kasus tidak dapat ditindaklanjuti karena bukan kasus korupsi.

Dari jumlah 1.651 kasus yang terindikasi korupsi, sebanyak 481 kasus telah dikoordinasikan dengan instansi lain, seperti polisi dan kejaksaan. Sebanyak 338 kasus yang terindikasi korupsi itu ditindaklanjuti KPK.

Salah satu catatan positif tampak dari meningkatnya kepatuhan pejabat negara. Tercatat pada tahun 2007 sebanyak 75.456 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara masuk ke KPK. Jumlah itu meningkat menjadi 95.359 pada tahun 2008.

Hal itu tidak dapat dilepaskan dari upaya persuasif KPK untuk mengundang para pejabat guna mengisi laporan harta kekayaan mereka. Langkah itu ampuh mencegah korupsi. (Kompas)

F. **OLAH RAGA** : **Tidak Ada**

G. **LINGKUNGAN HIDUP** : **Tidak Ada**

III. **ARTIKEL** :

1. Telaah -- Krisis Ekonomi Global Pasca-Sedasawarsa Krisis Ekonomi Asia (Oleh Bob Widayahartono, MA.)

Satu dasa warsa lalu (1997-1998), krisis ekonomi Asia, termasuk di negeri ini menjadi gejala yang sangat mendalam (kompleks) yang tak berpreseden dalam perjalanan bangsa ini.

Krisis ekonomi Asia saat itu muncul sebagai dampak menjalar (*contagion effect*) krisis yang diawali di Thailand ke negara-negara di selatan dan ke utara ke Korea Selatan. Krisis ekonomi di Indonesia saat itu karena ketidakmampuan pemerintah negeri ini menahan dampak tersebut, serta sebagai akibat saling keterkaitan faktor fundamental ekonomi-politik yang sebelumnya telah berlangsung lama dan akumulatif.

Sebagai bahan telaah, oleh enam dosen termasuk penulis, Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti di Jakarta pada akhir November 1998 menyajikan buku berisikan pokok-pokok tinjauan krisis Ekonomi dan Masa Depan Reformasi Indonesia. dengan editor Tulus Tambunan dan Budi Santosa. Buku ini, diterbitkan dalam rangka Dies Natalis ke-33 Univeritas Trisakti. Penulis waktu itu memberikan sumbangan tulisan Mendayung Maju di Masa Krisis: Memulihkan Kepercayaan Dunia Bisnis Indonesia.

Kaidah-kaidah ekonomi kian tumpul untuk memahami fenomena moneter yang berkembang tanpa arah yang jelas. Tampak jelas adanya semacam permainan oleh para spekulan asing dan domestik para konglomerat tak beretika. Ketika itu, masalah fundamental ekonomi menjadi perbincangan hangat, menyusul ketidakstabilan luar biasa nilai mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah yang melonjak waktu itu sampai Rp.15.000-an per dolar AS

Gugatan mendesak perlunya mau ber-*sense of crisis* untuk segera ditanggapi dengan kecekatan reformasi kepemimpinan (*leadership*). Dengan segala daya upaya oleh kalangan elite

dan didukung oleh kalangan pengamat digerakkanlah proses pencarian jalan keluar bersemboyan "reformasi".

Waktu itu, kepemimpinan peralihan ke Presiden B.J. Habibie, setelah lengsernya Presiden Soeharto, dalam menggerakkan reformasi dituntut memberi arah fokus baru yang meyakinkan hingga menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat domestik dan pada gilirannya oleh masyarakat internasional.

Apa yang diharapkan dari perubahan-perubahan? Secara struktural diungkapkan oleh berbagai kalangan pengamat, yakni pembaruan perundangan dunia perbankan, supervisi dalam sektor finansial dan ketatalokaan korporat yang makin dapat diandalkan. Untuk itu perlu kemauan politik meniadakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) alias kroniisme dalam perekonomian di negeri ini.

Kesadaran mewujudkan reformasi mulai tumbuh sejak medio 1998 dan menjadi simbol strategis berbagai kalangan elite dan pengamat untuk menata kembali untuk menyelesaikan krisis itu. Belajar dari sejarah satu dasa warsa lalu dan bagaimana tekad keluar dari krisis tersebut, merupakan bekal visi bagi elite dan pengamat tersendiri memasuki tahun 2009 dan selanjutnya.

Kini, situasi dan kondisi di Indonesia berbeda karena menerima dampak krisis ekonomi global yang disulut oleh permainan para spekulan raksasa tak bermoral di Pasar Modal Wall Street di AS semakin jelas terasakan sejak tahun 2007/2008. Memang yang paling parah terkena krisis itu adalah masyarakat Amerika sendiri dan menjalar ke Eropa. Negara negara Asia, sebut mulai Jepang, Korea Selatan, China dan Asia Tenggara, karena pemain pasar modal tidak gegabah spekulatif, tidak terseret dalam permainan Wall Street tersebut.

Memasuki tahun 2009, bagaimana prospek ekonomi Asia termasuk Indonesia? Sesungguhnya, perimbangan kekuatan ekonomi di seluruh dunia sudah tertata sebelum tahun 2007/2008, ketika negara negara di Asia Timur, termasuk negara perhimpunan bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dengan catatan Jepang yang belakangan ini masih terkena krisis sebagai negara Asia. Krisis finansial global justru tampak mengukuhkan perubahan yang digeluti negara-negara Asia tersebut.

Walaupun angka pertumbuhan negara Asia tersebut juga mengalami penurunan, namun pertumbuhan mereka lebih tinggi dibandingkan negara-negara AS dan Eropa Barat. Dunia pada umumnya memasuki tahun 2009 mulai berharap pada Asia khususnya China dengan kekuatan sektor riilnya ditopang oleh Jepang, Korea Selatan, India ASEAN (yang terdiri atas 10 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, Filipina, Laos, Vietnam, Myanmar dan Brunai Darussalam).

Pihak Indonesia, yang masih melemah adalah sektor riil di negeri ini sebagai dampak menurunnya beberapa gejala ekspor, yang menyurutkan sektor industri untuk ekspor, sedangkan nilai mata uang tidak terkena imbas krisis parah yang dibuat oleh pemain pemain Wall Street. Rupiah kita akan masih bisa diprediksi sekitar Rp.10.000-Rp.11.000.- an per dolar AS, yang ke depan diharapkan kembali ke Rp.9500 an per satu dolar AS.

Dampak yang masih terungkap adanya kesenjangan antara kebijakan makro disatu sisi dan realita pada tingkat mikro pelaku usaha, pihak UKM (Usaha Kecil dan Menengah) terutama di daerah daerah yang jauh dari pusat.. Meskipun demikian, optimisme harus selalu ditiupkan di kalangan pelaku ekonomi sendiri untuk tidak mandek dan menurun.

Kebijakan ekonomi perlu difokus pada pemberdayaan pihak permintaan dari ekonomi (*the demand side of the economy*). Dengan jumlah penduduk yang mencapai 230 juta-an dapat menjadi daya gerak pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan secara realistik, antara lain dengan implementasi Undang Undang Otonomi Daerah dan rancangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang menjadi dasar kebijakan infrastruktur pemberdayaan daerah yang makin potensial untuk kemajuan ekonomi.

Apa masih terus bersandar pada mata uang dolar AS? Selama ini proses transaksi ekonomi masih menggunakan mata uang dolar Amerika. Saatnya kini mulai memasuki tahun 2009 dan selanjutnya dengan makin mantapnya Asia dalam abad 21 ini, dengan cadangan devisa China, Jepang dan Asia Timur yang makin "berbicara", perlu menjadi pemikiran memakai mata uang alternatif, mulai dengan Yuan, Yen, Euro, dan Pound Sterling, dalam menghitung transaksi bisnis, investasi dan hubungan internasional yang makin diandalkan, terutama untuk transaksi sektor riil masing masing.

Menurut logikanya, reformasi dan peralihan jangan sampai dilihat sebagai momok atau ancaman, tetapi dijadikan sebagai peluang yang realistik.. Salah satu yang utama adalah *good*

public governance dalam arti pelayanan sesuai aturan hukum (*rule of law*) dan bukan *law of the ruler*, terutama di eselon menengah. Beretika dalam pelayanan lebih baik, lebih cepat, dan lebih tepat biaya/efisiensi tanpa pungli dan mengulur ulur waktu. Ini bukan semboyan melulu. Penuh janji-janji. Inilah panggilan pelaku birokrasi, terutama eselon menengah yang diberdayakan.

Mulai dengan refleksi diri dan melihat ke masa depan, maka inilah bekal pembelajaran para pelaku ekonomi termasuk eselon manajemen menengahnya dan tentunya pemerintah di eselon menengah, agar tetap memiliki kompetensi profesional/etis dalam jaringan kerja vertikal dan horizontal dan lintas sektoral, demi kebersamaan memasuki tahun 2009 dan selanjutnya.

Kini saatnya para elite dengan peranserta para pengamat dan pelaku ekonomi di pusat dan di daerah untuk memfokus pada kebijakan sisi permintaan ekonomi (*the demand side of the economy*), dengan menanggalkan kebijakan neo-liberalisme dengan *market dogmatism* yang masih banyak kita kontek dari pola pikir para elite AS yang belum juga mampu berubah, sehingga berkumandanglah slogan politik Presiden AS terpilih Barack Obama mengenai tuntutan untuk berubah (*change*). (ANTARA)

IV. LAIN-LAIN : T i d a k
Ada
V. EDITORIAL :

1. Masih Dunia yang Belum Aman

Sebagaimana disinggung dalam refleksi Natal yang baru lalu, kita tampaknya akan meninggalkan tahun 2008 masih sebagai tahun yang penuh gejolak.

Memang bagi sebagian besar kalangan warga dunia, tahun 2008 akan diingat sebagai tahun kesulitan ekonomi. Namun, tahun 2008 juga masih ditandai konflik di berbagai tempat di dunia. Yang menambah keprihatinan, konflik paling mencolok justru di kawasan Timur Tengah, kawasan tempat munculnya amanat-amanat damai bagi bangsa-bangsa di Bumi.

Hari-hari ini dunia sedang mengecam keras serangan Israel ke Jalur Gaza. Serangan dengan jet tempur canggih sejak Sabtu lalu hingga awal pekan ini sudah menewaskan lebih dari 300 warga Palestina. Korban diperkirakan akan terus bertambah jika Israel jadi melancarkan operasi darat untuk meredam serangan roket kelompok Hamas ke wilayah selatan negaranya.

Kita mengecam keras serangan brutal Israel ini. Pada sisi lain kita juga amat prihatin, mengapa setelah ada upaya demi upaya, perdamaian yang dicita-citakan bukan saja tidak kunjung mewujudkan, tetapi sebaliknya, malah tampak semakin jauh.

Lepas dari Timteng, perang terjadi di Afganistan, ajang yang tak kunjung padam meski AS dan sekutu Baratnya telah mengerahkan berbagai persenjataan canggih sejak melancarkan perang melawan teror menyusul serangan 11 September 2001.

Sementara Irak, yang diserbu dan kemudian diduduki AS Maret 2003, hingga sekarang masih terus bergolak. Bom masih meledak di pusat-pusat keramaian di Baghdad dan kota-kota Irak lainnya. Dengan datangnya pemerintahan baru di AS, juga komitmen untuk mundur dari Irak, kestabilan diharapkan bisa hadir di Irak.

Dalam tahun 2008 juga kita saksikan ketegangan di sejumlah negara, seperti kasus Thailand-Kamboja yang dipicu oleh klaim tumpang tindih atas wilayah perbatasan di sekitar Kuil Preah Vihear. Sementara di Afrika ada konflik perbatasan antara Djibouti dan Eritrea. Juga konflik di Ossetia Selatan, yang bermaksud memisahkan diri dari Georgia dan memicu keterlibatan Rusia yang lalu mengirimkan tank ke wilayah ini Agustus lalu.

Semua itu tentu masih menjadi kekhawatiran, dunia masih jauh dari perdamaian. Meskipun berdasarkan pengalaman tahun-tahun terdahulu kita juga tahu dunia yang terbebas dari konflik belum pernah terjadi, kini kekhawatiran justru makin besar.

Krisis perekonomian yang tak segera bisa ditanggulangi bisa menjadi faktor negatif yang akan memperbesar potensi konflik di tahun yang akan datang. Pelajaran tahun 2008 perlu kita simak. (Kompas)

2. Count our blessings

Another year is about to end and a new one about to begin. This time around, we in Indonesia should count our blessings because 2008 has been relatively quiet compared to the

turbulence and violence that many other parts of the world have experienced, or compared to what we in Indonesia had grown accustomed to in previous years.

Before we ring out the old and ring in the new, however, please spend a few moments thinking of those who have been less fortunate -- those living through wars, conflicts, fears and intimidations, disasters, poverty, hunger and misery all through the year.

We have all the more reason to pray for them because Indonesia has largely been spared from those calamities in 2008.

God has been kind to Indonesia, for a change.

There were no major disasters, natural or man-made, to speak of, that in the past have always distracted us from the main agenda of building a nation that is free, just and prosperous as our founding fathers had envisioned.

There were no devastating earthquakes, tsunamis or volcanic eruptions, and there were no deadly plane crashes, train collisions or sinking ships.

We have had our share of floods but not as severe as was experienced in other parts of Asia. And the bird flu epidemic has largely been brought under control.

One terrorist master on Indonesia's most-wanted list may still be lurking, but the fact that he did not carry out a single major attack in 2008 meant that his space has been constrained with the police close on his trail.

We had our share of energy crises that were global in nature, and again, Indonesia was much better positioned than most other countries in dealing with this, thanks to our abundant sources of energy supplies.

When other nations experienced a food crisis early in the year, Indonesia reported a record rice harvest and was able to export some.

The international media, which has a penchant for bad news, ignored Indonesia for most of 2008. They trained their cameras instead on Asia's other major trouble spots. It's nice to be ignored once in a while.

It's true when they say that no news is good news, at least when it comes to getting international media attention. One foreign journalist based in Jakarta described Indonesia as "dull" in 2008. Dull can be good sometimes.

Domestically, this newspaper, as has other media in the country, been busy reporting the progress Indonesia has been making in nation building, as we marked 10 years of reformation and 100 years of national awakening.

The year 2008 was more a year of consolidating the political and economic reforms that began in 1998.

Indonesia was not without its challenges and there were some setbacks here and there amidst progress in most other fronts.

But one thing Indonesia can take pride in is that democracy is taking root in this country. Increasingly, more and more problems and disputes are now settled after going through the democratic process.

We may not be entirely happy with all the results, but that is what democracy is all about: You win some, you lose some. You lose one today, you win another tomorrow. The last thing we want is for one party to win everything all the time.

So it is, we ring out the old and ring in the new, with our heads up, and with a much more positive attitude than in previous years.

This is hardly a time for complacency though.

The coming year looks like it could be even more challenging, with an impending economic crisis that forecasters are predicting will make its deepest bite in the second quarter of 2009. And this is going to be a general election year, with all the good and bad consequences it always entails.

The outgoing year is more like a temporary reprieve for Indonesia. We know that natural disasters, such as earthquakes, tsunamis and volcanic eruptions -- and throw floods and forest fires into the pot for good measure -- have and always will be part of our lives.

While we count our blessings, we cannot always count on the continuing generosity of God. For all we know, 2008 may have been a case of calm before the big storm.

But at the very least, we can say that we are much better prepared than before, and better prepared than most other nations, for whatever 2009 may have in store for us.

Happy New Year and may God be with us all. (The Jakarta Post)

Jakarta, 31 Desember 2008
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media
Deplu